



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2011 – 2012
Masa Sidang : III
Rapat : Ke-
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.45 WIB s.d 17.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011 dan progres pelaksanaan APBN TA 2012
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Para Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.45 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah untuk membahas Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011 dan progres pelaksanaan APBN TA 2012
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dilanjutkan dengan pejabat eselon I lainnya untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum terkait tingkat serapan atas pelaksanaan anggaran tahun 2011 yang mencapai 90,18% dari total DIPA APBN 2011 sebesar Rp 56,93 Trilyun. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan serapan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Terkait dengan berulangnya pemblokiran/pembintangan anggaran yang berhubungan dengan ketersediaan lahan/tanah, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan ketersediaan lahan/tanah lebih dahulu sebelum menganggarkannya sehingga tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan.
3. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum agar mengalokasikan dana Sisa Anggaran Lebih Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 kepada program/kegiatan yang menjadi prioritas bagi pembangunan infrastruktur diantaranya untuk PPIP.
4. Komisi V DPR RI meminta Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan hasil evaluasi penyedia jasa APBN 2011 dalam rangka mendorong terciptanya penyedia jasa yang profesional dan bertanggung jawab.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum agar menyelesaikan seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2012, minimal persetujuan substansi.
6. Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum sepakat bahwa proses kontrak APBN 2012 dapat diselesaikan pada akhir Maret 2012. Sedangkan pemanfaatan sisa tender dan dana blokir yang tidak bisa dimanfaatkan dibahas kembali pada APBN-P 2012.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 1 Maret 2012

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

ttd

IR. AGOES WIDJANARKO, MIP

KETUA RAPAT,

ttd

Ir. H. MULYADI